

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

Karakteristik responden yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah keadaan atau identitas yang melekat pada responden sebanyak 26 anggota DPRD di Kabupaten Sikka. Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, tingkat usia, tingkat pendidikan, Analisis Kapabilitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Kinerja Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Sikka.

5.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin adalah pengklasifikasian data primer yang telah didapatkan dari responden ke dalam jenis kelamin laki – laki atau perempuan dimana akan dijelaskan pada tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Frekuensi dan Persentase Responden
Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki- Laki	23	88.46
Perempuan	3	11.53
Jumlah	26	100

Sumber: Hasil Pengolahan data Primer, 2019

Berdasarkan tabel di atas, responden dengan jenis kelamin laki-laki memiliki frekuensi lebih banyak dibandingkan responden dengan jenis kelamin perempuan,

dimana laki-laki dengan jumlah responden 23 orang sedangkan perempuan dengan jumlah responden 3 orang.

5.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Usia

Distribusi responden berdasarkan tingkat usia adalah pengklasifikasian data primer yang telah didapatkan dari responden berdasarkan tingkat usia yang ditunjukkan pada tabel 5.2 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Frekuensi Dan Persentase Responden
Berdasarkan Tingkat Usia

Usia	Frekuensi	Persentase (%)
31-40 Tahun	3	11.53
41-50 Tahun	11	42.30
51-60 Tahun	12	46.15
Jumlah	26	100

Sumber: Hasil Pengolahan data Primer, 2019

Tabel 5.2 menunjukkan frekuensi dan persentase responden berdasarkan tingkat usia, dimana responden dalam penelitian ini cenderung merupakan anggota DPRD dengan usia produktif yakni usia <30 tahun sebanyak 0 orang dengan persentase sebesar 0, usia 31-40 tahun sebanyak 3 orang dengan persentase 11.53, usia 41-50 tahun sebanyak 11 orang dengan persentase sebesar 42.30, usia 51-60 tahun sebanyak 12 orang dengan persentase sebesar 46.15.

5.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Karakteristik responden dibagi berdasarkan tingkat pendidikan karena tingkat pendidikan responden tidaklah sama satu dengan lainnya sehingga menanamkan pola pikir yang berbeda juga, pola pikir ini dapat mempengaruhi

kapabilitas Anggota DPRD oleh responden. Karakteristik Responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 5.3

Tabel 5.3
Frekuensi Dan Persentase Responden
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase(%)
SLTA	7	26.92
S1	19	73.07
Jumlah	26	100

Sumber: Hasil Pengolahan data Primer, 2019

Tabel 5.3 menunjukkan frekuensi dan persentase responden berdasarkan tingkat pendidikan dimana responden terbanyak adalah responden dengan jenjang pendidikan terakhir S1 sebanyak 19 orang dengan persentase sebesar 73.07 dan responden paling sedikit adalah responden dengan jenjang pendidikan SLTA sebanyak 7 orang dengan persentase 26.92

5.2 Analisis Statistik Deskriptif

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa tujuan analisis data secara deskriptif adalah untuk menggambarkan bagaimana tanggapan responden untuk masing-masing indikator maupun secara total untuk variable tersebut. Hasil jawaban tersebut selanjutnya digunakan untuk melihat tendensi jawaban responden mengenai kondisi masing-masing indikator penelitian.

Tabel 5.4
Hasil tanggapan 26 responden pada Analisis Kapabilitas Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Kinerja Pengawasan Keuangan
Daerah di Kabupaten Sikka

Indikator	Nomor	Skor					
		SS	S	N	TS	STS	Jumlah
Political Background	1	21	2	1	2	0	26
	2	21	3	1	1	0	26
	3	21	2	3	0	0	26
	4	21	4	1	0	0	26
	5	13	1	7	4	1	26
	6	17	5	1	3	0	
Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran	1	10	7	0	7	2	26
	2	13	3	2	8	0	26
	3	22	4	0	0	0	26
Pemahaman Dewan Terhadap Peraturan, Prosedur, dan Kebijakan	1	17	8	1	0	0	26
	2	21	4	1	0	0	26
	3	13	1	7	4	1	26
Kinerja	1	17	6	1	2	0	26
	2	11	6	0	7	2	26
	3	13	3	2	8	0	26
Jumlah		230	57	27	44	6	338

5.2.1 Variabel *Political Background*

Variabel *Political Background* dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggapan Anggota DPRD melalui pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Tanggapan responden untuk variabel Political Backround dapat dirangkum dalam table 5.5

Tabel 5.5
Deskripsi Variabel *Political Background*

Item Pernyataan	Skor (%)	Kategori Item Pernyataan	Indikator	Skor (%)	Kategori Indikator	Skor (%)	Kategori Variabel
P1	93.08	Sangat Baik	Aktif dalam bidang politik	93.08	Sangat Baik	89.85	Sangat Baik
P2	93.85	Sangat Baik	Pengalaman bidang politik	93.85	Sangat Baik		
P3	94.62	Sangat Baik	terlibat aktif sebagai anggota partai	94.62	Sangat Baik		
P4	95.38	Sangat Baik	Tindakan	95.38	Sangat Baik		
P5	76.15	Baik	terlibat aktif sebagai pengurus partai	76.15	Baik		
P6	89.23	Sangat Baik	Kemampuan	89.23	Sangat Baik		

Sumber: Hasil Pengolahan data Primer, 2019

Table 5.5 menunjukkan kategori deskripsi variabel *Political Background* dari 26 responden anggota DPRD di Kabupaten Sikka sebagai berikut; indikator 1 memiliki skor nilai 93.08 dengan kategori sangat baik, indikator 2 memiliki skor nilai 93.85 dengan kategori sangat baik, indikator 3 memiliki skor nilai 94.62 dengan kategori sangat baik, indikator 4 memiliki skor nilai 95.38 dengan kategori sangat baik, indikator 5 memiliki skor nilai 76.15 dengan kategori baik dan indikator 6 memiliki skor 89.32 dengan kategori sangat baik. Analisis Kapabilitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Kinerja Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Sikka.

Maka hasil ini menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian terhadap Persepsi *Political Background* dalam kapabilitas anggota DPRD. Menurut Indah Mustika (2011), *Political Background* adalah latar belakang dari pengalaman seseorang di dunia politik. Berbicara mengenai politik, tentu saja tidak terlepas dari partai politik. Setiap lembaga (DPRD) memiliki *political background* seperti individu yang ada didalamnya. Karakteristik utama dari *political background* adalah terkait dengan nilai. Nilai merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai pedoman hidup individu, dengan kata lain *political background* merupakan pedoman bagi anggota DPRD dalam menjalankan perannya khususnya yaitu pengawasan keuangan daerah (APBD).

5.2.2 Variabel Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran

Variabel Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggapan Anggota DPRD melalui

pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Tanggapan responden untuk variabel Teknologi dapat dirangkum dalam table 5.6

Tabel 5.6
Deskripsi Variabel Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran

Item Pernyataan	Skor (%)	Kategori Item Pernyataan	Indikator	Skor (%)	Kategori Indikator	Skor (%)	Kategori Variabel
P1	72.31	Baik	Pengetahuan tentang peraturan	72.31	Baik	49.08	Kurang Baik
P2	76.15	Baik	Pengetahuan terhadap anggaran	76.15	Baik		
P3	96.92	Sangat Baik	Terlibat mengolah APBD	96.92	Sangat Baik		

Sumber: Hasil Pengolahan data Primer, 2019

Table 5.6 Menunjukkan data di atas terlihat bahwa kategori variabel pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dari presepsi 26 responden anggota DPRD sebagai berikut; dari 3 item pernyataan variabel pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran, ada dua item pernyataan masuk kategori baik, dan satu item pernyataan dalam kategori sangat baik. Secara keseluruhan kategori variabel Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran baik.

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/APBD. Untuk meningkatkan kapabilitas dalam pengawasan keuangan daerah, DPRD harus menguasai keseluruhan struktur dan proses anggaran.

5.2.3 Variabel Pemahaman Dewan Terhadap Peraturan, Prosedur, dan Kebijakan

Variabel Pemahaman Dewan Terhadap Peraturan, Prosedur, dan Kebijakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggapan Anggota DPRD di Kabupaten Sikka melalui pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Tanggapan responden untuk variabel Pemahaman Dewan Terhadap Peraturan, Prosedur, dan Kebijakan dapat dirangkum dalam table 5.7

Tabel 5.7
Deskripsi Variabel Pemahaman Dewan Terhadap Peraturan, Prosedur, dan Kebijakan

Item Pernyataan	Skor (%)	Kategori Item Pernyataan	Indikator	Skor (%)	Kategori Indikator	Skor (%)	Kategori Variabel
P1	92.31	Sangat Baik	Tindakan sesuai prosedur	92.31	Sangat Baik	52.77	Cukup Baik
P2	95.38	Sangat Baik	Pengawasan terhadap APBD	95.38	Sangat Baik		
P3	76.15	Baik	Menentukan keputusan APBD	76.15	Baik		

Sumber: Hasil Pengolahan data Primer, 2019

Table 5.7 menunjukkan kategori deskripsi variabel Pemahaman Anggota Dewan Terhadap Peraturan, Prosedur, dan Kebijakan dari 26 responden Anggota DPRD di Kabupaten Sikka indikator 1 memiliki skor nilai 92.31 dengan kategori sangat baik, indikator 2 memiliki skor nilai 95.38 dengan kategori sangat baik, dan indikator 3 memiliki skor nilai 76.15 dengan kategori baik. Analisis Kapabilitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Kinerja Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Sikka.

Penelitian ini menunjukan bahwa dalam pemahaman anggota DPRD

mengenai peraturan, prosedur, dan kebijakan sudah berjalan baik sesuai prosedur yang berlaku. Sementara itu menurut Jufri Daerma SE,M.Si dan Ali Fikri Hasibuan, SE M.Si adanya peraturan, prosedur dan kebijakan tentang keuangan daerah ditujukan untuk membantu anggota dewan dalam melaksanakan perannya dalam hal ini yaitu melakukan pengawasan keuangan daerah.

5.2.4 Variabel Kinerja

Yang dimaksud dengan variable Kinerja dalam penelitian ini adalah seberapa banyaknya persepsi Anggota DPRD di Kabupaten Sikka tersebut. Berikut ini perolehan hasil uji deskriptis; Tanggapan responden untuk variable kinerja dapat dirangkum dalam table 5.8

Tabel 5.8
Deskripsi Variabel Kinerja

Item Pernyataan	Skor (%)	Kategori Item Pernyataan	Indikator	Skor (%)	Kategori Indikator	Skor (%)	Kategori Variabel
P1	89.23	Sangat Baik	Pengelolaan APBD tepat sasaran	89.23	Sangat Baik	47.69	Kurang Baik
P2	73.08	Baik	Pengelolaan tepat waktu	73.08	Baik		
P3	76.15	Baik	Pengelolaan TransparaNsi	76.15	Baik		

Sumber: Hasil Pengolahan data Primer, 2019

Table 5.8 Data diatas menjelaskan perolehan hasil variable Kinerja baik. Penyelenggaraan tentang kinerja bertujuan untuk meningkatkan transparansi anggaran keuangan daerah agar pengelolaan keuangan daerah dapat mencapai tujuan, biar tepat sasaran dan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kinerja individu merupakan dasar dari kinerja organisasi. Penilaian kinerja mempunyai peranan penting dalam peningkatan motivasi ditempat kerja. Penilaian kinerja ini pada dasarnya merupakan faktor utama guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien. Gibson (1999) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil yang diinginkan dari perilaku. Kinerja individu merupakan dasar dari kinerja organisasi. Penilaian kinerja mempunyai peranan penting dalam peningkatan motivasi ditempat kerja. Penilaian kinerja ini pada dasarnya merupakan faktor utama guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien.

5.3 Analisis Statistik Inferensial

5.3.1 Analisis Data Partial Least Square (PLS)

Teknik pengolahan data dengan menggunakan metode SEM berbasis *Partial Least Square* (PLS) memerlukan 2 tahap untuk menilai *Fit Model* dari sebuah model penelitian (Ghozali, 2006). Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menilai *Outer Model* atau *Measurement Model*

Terdapat tiga kriteria di dalam penggunaan teknik analisis data dengan SmartPLS untuk menilai *outer model* yaitu: 1) *Convergent validity* 2) *Discriminant Validity*: dan 3) *Composite Reliability*. *Convergent validity* dari model pengukur dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara *item score/component score* yang diestimasi. Ukuran reflektif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur. Namun menurut Chin, 1998 (dalam Ghozali,

2006) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai *Loading* 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai. Dalam penelitian ini akan digunakan batas *Loading factor* sebesar 0,60.

Tabel 5.9
Outer Loadings (Measurement Model)

	Kinerja (Y)	Political Background (X1)	pemahaman terhadap peraturan, prosedur, dan kebijakan (X3)	pengetahuan tentang anggaran (X2)
P1		0.572		
P10			0.802	
P12			0.799	
P13	0.794			
P15	0.782			
P2		0.817		
P5		0.690		
P6		0.912		
P8				0.880
P9				0.846

Sumber : Pengolahan data dengan PLS, 2019

Hasil olah data dengan menggunakan SmartPLS dapat dilihat pada table di atas, dimana nilai outer model atau korelasi antara konstruk dengan variabel memenuhi *convergrn validity* karena seluruh indikator yang memiliki nilai *loading factor* menunjukkan di atas 0,60 sehingga konstruk untuk semua variabel sudah tidak ada yang dieliminasi dari model.

2. ***Discriminant Validity***

Discriminant Validity dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing variabel laten berbeda dengan variabel lainnya. Model mempunyai *discriminant validity* yang baik jika setiap nilai loading dari setiap indicator dari sebuah variabel laten memiliki nilai loading yang paling besar dengan nilai loading

lain terhadap variabel laten lainnya. Hasil pengujian *discriminant validity* diperoleh sebagai berikut;

Table 5.10
Discriminant Validity

	Kinerja (Y)	Political Background (X1)	pemahaman terhadap peraturan, prosedur, dan kebijakan (X3)	pengetahuan tentang anggaran (X2)
Kinerja (Y)	0.788			
Political Background (X1)	0.784	0.759		
pemahaman terhadap peraturan, prosedur, dan kebijakan (X3)	0.618	0.803	0.800	
pengetahuan tentang anggaran (X2)	0.859	0.565	0.493	0.863

Sumber: pengolahan data dengan PLS,2019

Tabel 5.10 di atas dapat dilihat bahwa beberapa nilai *loading factor* untuk setiap indicator dari masing-masing variabel laten masih memiliki nilai *loading factor* yang tidak paling besar dibanding nilai *loading factor* jika dihubungkan dengan variabel laten lainnya. Hal ini berarti bahwa setiap variabel laten belum memiliki *discriminant validity* yang baik dimana beberapa variabel laten masih memiliki pengukur yang berkorelasi tinggi dengan konstruk lainnya.

3. Mengevaluasi *Reliability* dan *Average Variance Extracted (AVE)*

Kriteria *validity* dan reliabilitas juga dapat dilihat dari nilai reliabilitas suatu konstruk dan nilai *Average Variance Extracted (AVE)* dari masing-masing konstruk. Konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika nilainya 0,70 dan nilai AVE berada diatas 0,50. Pada tabel berikut akan disajikan nilai *Composite Reliability* dan AVE untuk seluruh variabel.

Tabel 5.11
Composite Reliability dan Average Variance Extracted

	Cronbach's Alpha	rho_A	Reliabilitas Komposit	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)
Kinerja (Y)	0.390	0.391	0.766	0.621
Political Background (X1)	0.757	0.841	0.840	0.575
pemahaman terhadap peraturan, prosedur, dan kebijakan (X3)	0.439	0.439	0.781	0.641
pengetahuan tentang anggaran (X2)	0.658	0.664	0.853	0.744

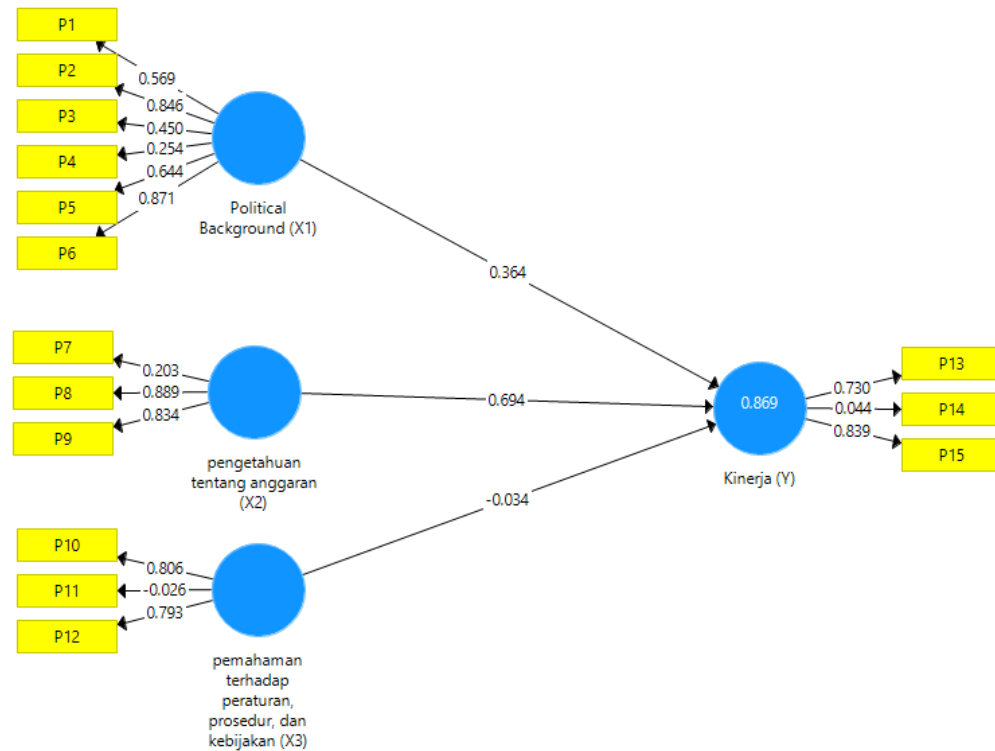
Sumber: pengolahan data dengan PLS,2019

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua konstruk memenuhi kriteria reliabel. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa nilai *composite reliability* di atas 0,70 dan nilai AVE di bawah 0,50.

4. Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen, uji t, serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.

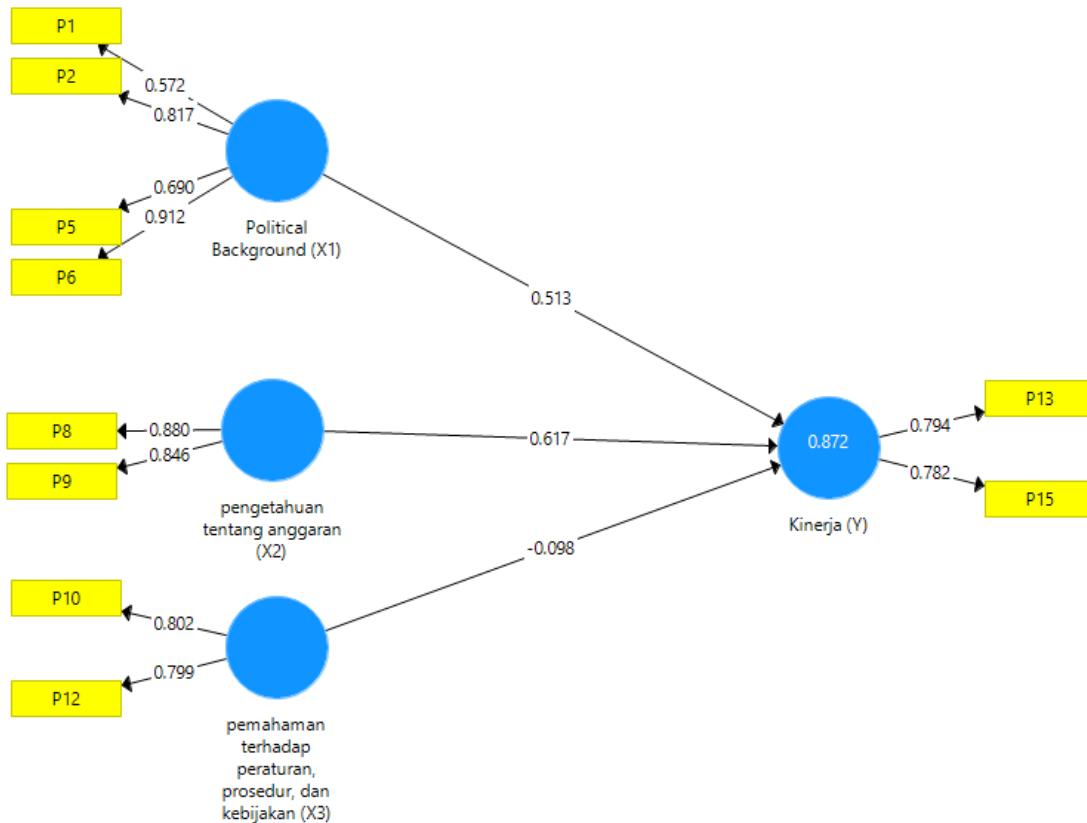
Gambar 5.1
Model Struktural



Sumber : Pengolahan data dengan PLS,2019

Pada Gambar Model Struktural menunjukkan hasil pengolahan data PLS pada variabel bebas yaitu political background, pengetahuan tentang anggaran, pemahaman tentang peraturan, prosedur, dan kebijakan yang mempengaruhi variable terikat yaitu kinerja dengan batas nilai level signifikansi 0,50. Nilai yang lebih kecil dari batas pengukurang yakni 0,50 akan dihilangkan.

Gambar 5.2
Model Struktural R-Square



Sumber: pengolahan data dengan PLS, 2019

Pada gambar Model Struktural R-square menunjukkan bahwa beberapa pernyataan dari masing-masing variabel dihilangkan karena tidak memenuhi nilai ikorelasi yaitu 0,5. Pernyataan yang dihilangkan antara lain: p3, p4, p7, p11 dan p14 karena dari pernyataan tersebut lebih kecil atau tidak lebih besar dari 0,5.

Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten independen. Tabel 5.12 merupakan hasil estimasi R-square dengan menggunakan SmartPLS .

Tabel 5.12
Nilai R-Square

	R Square	Adjusted R Square
Kinerja (Y)	0.872	0.854

Sumber: pengolahan data dengan PLS,2019

Penelitian ini menggunakan 1 variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu variabel Kinerja(Y) yang dipengaruhi oleh *Political Background* (X_1), Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran (X_2), dan Pemahaman Dewan Terhadap Peraturan, Prosedur, dan Kebijakan (X_3).

Tabel 5.12 menunjukkan nilai *R-Square* untuk variabel penghambat pengadaan barang/jasa (Y) diperoleh sebesar 0,872. Hasil menunjukan bahwa 87,2% kinerja (Y) dapat dipengaruhi oleh *Political Background*(X_1), Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran (X_2), dan Pemahaman Dewan Terhadap Peraturan, Prosedur, dan Kebijakan (X_3).

5.3.2 Uji Hipotesis

Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian. Dasar yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat pada output *result for inner weight*. Tabel 5.13 memberikan output estimasi untuk pengujian model struktural.

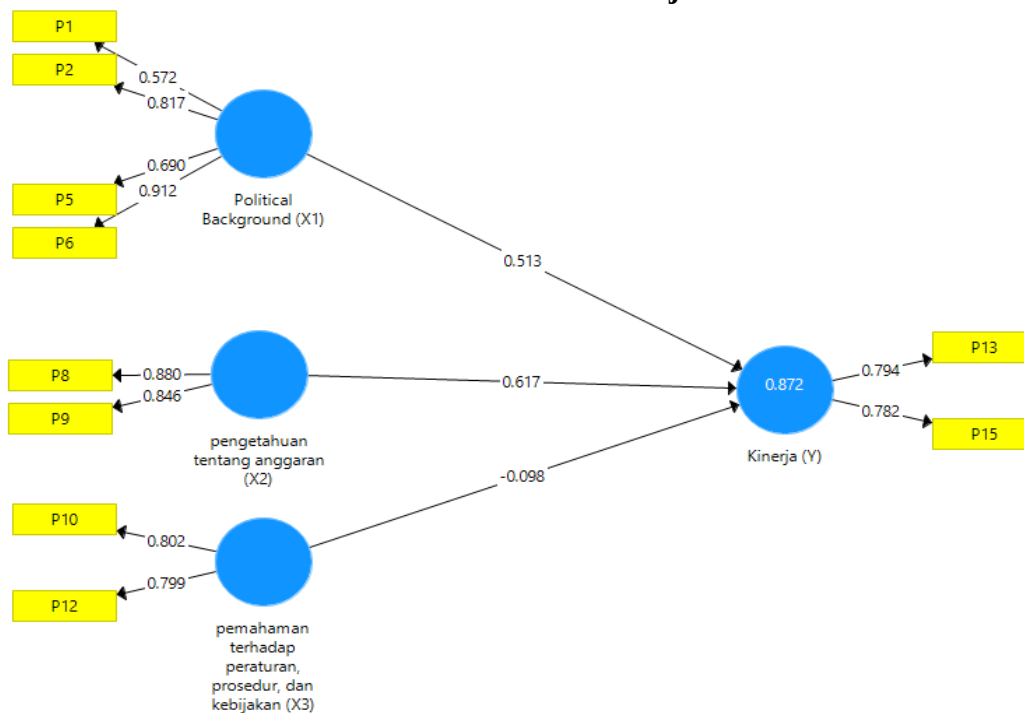
Tabel 5.13
Result For Inner Weights

	Sampel Asli (O)	Sample Mean (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (O /STDEV)	P Values
Political Background (X1) -> Kinerja (Y)	0.513	0.463	0.386	1.330	0.184
pemahaman terhadap peraturan, prosedur, dan kebijakan (X3) -> Kinerja (Y)	-0.098	-0.076	0.202	0.485	0.628
pengetahuan tentang anggaran (X2) -> Kinerja (Y)	0.617	0.637	0.244	2.531	0.012

Sumber: pengolahan data dengan PLS,2019

Model Struktural uji t, dan signifikansi dari koefisien parameter jalur structural berikut ini;

Gambar 5.3
Model Struktural Uji t



Sumber : Pengolahan data dengan PLS,2019

Dalam PLS pengujian secara statistik setiap hubungan yang dihipotesiskan dilakukan dengan menggunakan simulasi. Dalam hal ini dilakukan metode bootstrap terhadap sampel. Pengujian dengan bootstrap juga dimaksudkan untuk meminimalkan masalah ketidak normalan data penelitian. Hasil pengujian dengan bootstrapping dari analisis PLS adalah sebagai berikut:

a. Pengujian Hipotesis pengaruh *Political Background* (X1) terhadap Kinerja

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengaruh variable *Political Background* terhadap variabel Kinerja menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0.513 dengan nilai t sebesar 1.330. Nilai t tersebut lebih kecil dari t tabel (1,960) atau P value 0.184. Hal ini menyatakan *Political Background* memiliki hubungan yang positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja. Karakteristik utama dari *political background* adalah terkait dengan nilai. Nilai merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai pedoman hidup individu.

Dalam menjalankan tugasnya anggota DPRD diharuskan mengikuti aturan kerja yang ditetapkan sesuai bidang masing-masing, di sinilah latar belakang politik terkadang menyebabkan perbedaan sudut pandang bahkan terjadinya perselisihan.

b. Pengujian Hipotesis Pengetahuan Tentang Anggaran (X2) terhadap Kinerja (Y)

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pengaruh pengaruh tentang anggaran terhadap kinerja menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar -0.099

dengan nilai t sebesar 0.485. Nilai t tersebut lebih besar dari nilai t tabel (1,960) atau P Values 0.628. Hasil ini menyatakan bahwa Pengetahuan tentang anggaran tidak memiliki hubungan yang positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja. Pengetahuan tentang sesuatu merupakan dasar bagi siapa saja dalam melakukan suatu tindakan atau bersikap terhadap sesuatu tersebut. Pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang di hadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD. Semakin luas pengetahuan anggota dewan tentang anggaran maka semakin besar kapabilitas anggota dewan tersebut dalam melakukan pengawasan keuangan daerah.

c. Pengujian Hipotesis Pemahaman tentang peraturan, kebijakan, dan prosedur (X3) terhadap Kinerja (Y)

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pengaruh Pemahaman tentang peraturan, kebijakan, dan prosedur terhadap Kinerja menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0.617 dengan nilai t sebesar 2.531. Nilai t tersebut lebih besar dari nilai t tabel (1.960) atau P Values 0.012. Hasil ini menyatakan bahwa Pemahaman tentang peraturan, kebijakan, dan prosedur memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja. Berarti hipotesis ketiga dimana Pemahaman tentang peraturan, kebijakan, dan prosedur mendorong Anggota DPRD untuk menganalisis pengaruh Pemahaman tentang peraturan, kebijakan, dan prosedur. Hal ini berarti hipotesis ketiga tidak diterima oleh anggota DPRD.

5.4 Pembahasan

5.4.1 Pengaruh *Political Background* (X1) terhadap Kinerja

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengaruh variable *Political Background* terhadap variabel Kinerja menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0.513 dengan nilai t sebesar 1.330. Nilai t tersebut lebih kecil dari t tabel (1,960) atau P value 0.184. Hal ini menyatakan *Political Background* memiliki hubungan yang positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja. Berarti hipotesis pertama dimana *Political Background* mendorong Anggota DPRD terhadap Kinerja DPRD. Artinya *political background* atau latar belakang politik seorang anggota dewan berpengaruh terhadap kinerja seorang anggota dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah Mustika (2011), yang menyatakan bahwa *political background* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pengawasan keuangan daerah. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Rizki Haryani (2010), yang menyatakan bahwa *political background* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pengawasan keuangan daerah. Hal ini dikarenakan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah latar belakang politik seseorang anggota dewan tidak menjadi tolak ukur sehingga tidak menimbulkan asumsi yang menyatakan penyalahgunaan anggaran.

5.4.2 Pengaruh Pengetahuan tentang anggaran (X2) terhadap Kinerja (Y)

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap kinerja menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar -0.099 dengan nilai t sebesar 0.485. Nilai t tersebut lebih besar dari nilai t tabel (1,960) atau P Values 0.628. Hasil ini menyatakan bahwa Pengetahuan tentang anggaran tidak memiliki hubungan yang positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasriwan (2008), yang menyatakan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pengawasan keuangan daerah. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrardi (2001), Syamsir (2001), dan Sutamto (2002), yang menyatakan bahwa kualitas anggota dewan diukur berdasarkan tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja anggota dewan dalam melakukan pengawasan keuangan. Dengan pengungkapan semakin tinggi pengetahuan anggota dewan, akan semakin meningkat kualitas hasil pekerjaan anggota dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah.

5.4.3 Pengaruh Pemahaman tentang peraturan, kebijakan, dan prosedur (X3) terhadap Kinerja (Y)

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pengaruh Pemahaman tentang peraturan, kebijakan, dan prosedur terhadap Kinerja menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0.617 dengan nilai t sebesar 2.531. Nilai t tersebut lebih besar dari nilai t tabel (1.960) atau P Values 0.012. Hasil ini menyatakan bahwa

Pemahaman tentang peraturan, kebijakan, dan prosedur memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja. Berarti hipotesis ketiga dimana Pemahaman tentang peraturan, kebijakan, dan prosedur mendorong Anggota DPRD untuk menganalisis pengaruh Pemahaman tentang peraturan, kebijakan, dan prosedur. Hal ini berarti hipotesis ketiga tidak diterima oleh anggota DPRD.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2009) yang menyatakan bahwa, pemahaman anggota DPRD tentang peraturan, kebijakan, dan prosedur tidak berpengaruh terhadap kinerja pengawasan keuangan daerah. Namun penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah Mustika Dewi (2011) yang menyatakan bahwa, semakin tinggi pemahaman anggota dewan maka semakin kapabel anggota dewan melakukan pengawasan keuangan daerah sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan bersama.